



**BADAN LITBANG & DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**



POLICY BRIEF

TRIANGULASI DAN PENGUATAN RANCANGAN KEBIJAKAN TAHUN 2024

(Evaluasi Kampung Moderasi beragama di Dusun Maccera,
Desa Mammi, Kecamatan Binnuang, Kabupaten Polman)



**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
AGAMA MAKASSAR**

TRIANGULASI DAN PENGUATAN RANCANGAN KEBIJAKAN TAHUN 2024 (EVALUASI KAMPUNG MODERASI BERAGAMA DI DUSUN MACCERA DESA MAMMI KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLMAN)

NURHIDAYAH PUTRI WIJAYANTI YUSUF, S.Sos

Analisis Kebijakan Ahli Pertama

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Kementerian Agama

Email: blamputri@gmail.com

Executive Summary

Kampung moderasi beragama di dusun maccera desa mammi kecamatan binuang kabupaten polewali mandar merupakan salah satu kampung dari 236 kampung moderasi beragama yang tersebar diseluruh indonesia yang telah melaksanakan launching dimana desa tersebut mampu menjadi contoh dengan hadirnya beragam etnis dan agama yang sudah hidup berdampingan yaitu agama islam, kristen dan katolik serta etnis/suku: Pettae, Mandar, Mamasa, Toraja, Bugis, Makassar dan Jawa dan dari hasil riset yang dilakukan Balai Litbang Agama Makassar ditemukan bahwa pemerintahan mencakup Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah nilainya 68.18% dalam cakupan "terlaksana baik" sedangkan Tokoh Masyarakat mencakup orang tokoh masyarakat/tokoh agama nilainya 51.52% dalam cakupan "cukup terlaksana" dengan beberapa indikator penyebab nilai hasil evaluasi KMB sangat kurang yaitu belum tersedia informasi geografis, informasi sosial ekonomi, informasi sosial budaya dan agama, posko/sekretariat, struktur kepengurusan, program tahunan dan jadwal pertemuan rutin serta tokoh agama dan tokoh masyarakat belum pernah mengikuti penguatan Kampung Moderasi Beragama dan dari hasil Focus Group Siscussion (FGD) diperoleh Reality/kendala yaitu para Penyuluh mengira kampung moderasi beragama hanya sebatas menjalankan program launching dari pemerintah pusat dan tidak ada upaya untuk mengembangkan program kampung moderasi beragama sehingga diperlukan komitmen bagi para pemangku kebijakan untuk menentukan arah kebijakan yang tepat dalam bentuk model pendampingan dari lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) agar para penyuluh dan tokoh agama serta tokoh masyarakat memiliki kompetensi dalam menyusun rencana program yang ditawarkan untuk menguatkan sistem kampung moderasi beragama yang lebih baik sehingga akan memperkuat modalitas kampung moderasi beragama khususnya di desa Mammi.

Kata Kunci : Evaluasi, Kampung moderasi beragama, Desa Mammi

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa majemuk baik dari aspek suku, budaya, bahasa maupun agama. Semuanya merupakan kekayaan dan potret pluralisme indonesia. Kebhinekaan ini menjadi identitas penting indonesia yang harus terus dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk menjaga identitas tersebut melalui Perpres 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif, dan berkelanjutan maka diperlukan program dalam rangka penguatan moderasi beragama, salah satunya adalah pembentukan kampung moderasi

beragama.

Program kampung moderasi beragama sebagai upaya penguatan nilai-nilai moderat di tengah masyarakat. Program ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya beragama dengan moderat, toleran, dan menghargai perbedaan.

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada bulan Juli 2023 seiring dikeluarkannya Keputusan Nomor 137 Tahun 2023 tentang pedoman pembentukan Kampung Moderasi Beragama maka peran lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat memberi kekuatan dan keberlanjutan dalam mencapai tujuan program.

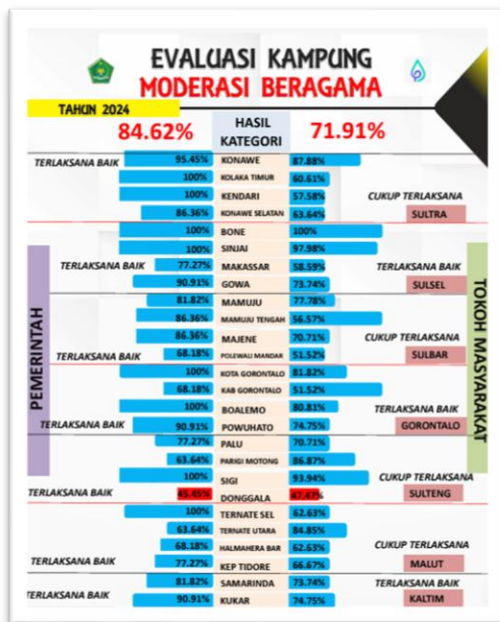
Kampung moderasi beragama adalah model kampung yang mengutamakan kolaborasi lintas lembaga dan lintas masyarakat untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keragaman toleran dan memperkokoh sikap beragama yang moderat berbasis desa atau kampung. Komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama mencakup upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi semua agama dan kepercayaan untuk bersama-sama berjalan berdampingan secara damai.

Terpilihnya dusun maccera desa mammi kecamatan binuang kabupaten polman sebagai salah satu kampung moderasi beragama dimana desa tersebut mampu menjadi surga dengan hadirnya beragam etnis dan agama yang sudah hidup berdampingan. Adapun beberapa etnis/suku yang hidup berdampingan di desa macera antara lain; Pettae, Mandar, Mamasa, Toraja, Bugis, Makassar dan Jawa serta faktor terbesar yang juga memperkokoh kerukunan di desa ini adalah beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat desa, yakni Islam, Kristen dan Katolik bahkan hal yang unik yang ditemukan dari evaluasi Program KMB adalah terdapat kurang lebih 10 rumah yang anggota keluarganya berbeda agama serta tidak adanya sekat wilayah pemakaman khusus yang artinya satu wilayah pemakaman tersebut terdapat pemakaman islam, pemakaman katolik dan pemakaman kristen.

Keberagaman inilah yang membuat kampung ini nyaman, karena semua umat dari masing-masing agama menghargai perbedaan dan senantiasa hidup dengan aman, damai dan tentram. Sehingga masyarakat di desa ini bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan diri masing-masing bahwa keberagaman yang ada tercipta melalui kesadaran diri sebagai warga negara yang bernaung di bawah kebhinekaan.

B. Deskripsi Masalah

Pada pelaksanaan triangulasi dan penguatan rancangan kebijakan dilakukan teknik penyampaian dengan cara *Focus Group Siscussion (FGD)* dengan harapan diperoleh hasil sebagai diskusi bersama.



Gambar 1: Hasil evaluasi kampung moderasi beragama tahun 2024 di 7 Provinsi
Sumber : Balai Litbang Agama Makassar

Gambar diatas merupakan hasil evaluasi kampung moderasi beragama tahun 2024 yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Makassar di 7 Provinsi yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi tengah, Gorontalo, Maluku Utara dan Kalimantan Timur.

Khusus Sulawesi Barat telah dilakukan evaluasi di desa mammi dibawah binaan KUA Kecamatan Binuang. Pemerintahan mencakup Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah nilainya 68.18% dalam cakupan “terlaksana baik” sedangkan Tokoh Masyarakat mencakup tokoh masyarakat/tokoh agama yang memiliki keterlibatan langsung dengan aktifitas kampung moderasi beragama nilainya 51.52% dalam cakupan “cukup terlaksana”

Adapun terdapat beberapa hasil temuan dari riset yang dilakukan Balai Litbang Agama Makassar di kampung moderasi beragama Dusun Maccera Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polman adalah

1. Belum tersedia informasi geografis, informasi sosial ekonomi dan informasi sosial budaya dan agama di wilayah tersebut
2. Program tahunan belum tersusun, belum ada jadwal pertemuan rutin, struktur kepengurusan Kampung Moderasi Beragama di desa tersebut belum ada sehingga belum ada rancangan kerja program yang dibentuk.
3. Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat belum pernah mengikuti penguatan Kampung Moderasi Beragama
4. Belum terdapat posko/ sekretariat Kampung Moderasi Beragama
5. Pokja belum melakukan penilaian terhadap kinerja kepengurusan, hanya sebatas peninjauan sebelum membentuk Kampung Moderasi Beragama
6. Tidak tersedia papan potensi kegiatan Kampung Moderasi Beragama

Dari hasil temuan diatas bahwa ternyata masih terdapat permasalahan dan kendala dalam proses pembentukan kampung moderasi beragama ini dan tentunya peran aktif dari pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melakukan pengawasan melalui kegiatan audit kinerja serta terus mendorong penyelenggaraan kampung moderasi beragama yang lebih baik.

C. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan permasalahan diatas, ringkasan kebijakan ini menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut

1. Kementerian Agama membuat program pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat keagamaan untuk mengembangkan rancangan program kreatif
2. Kementerian agama membuka seleksi terbuka perekrutan Penyuluh agama islam, kristen, katolik, budha dan konghucu yang dapat ditempatkan di setiap desa khusus di kampung moderasi beragama
3. Pendampingan dalam pengelolaan dana mandiri misalnya mengadakan pameran khas kerajinan tangan masyarakat dengan tema komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan penerimaan terhadap tradisi sehingga hasilnya dapat dikelola untuk kegiatan rutin keagamaan.
4. Pemasangan sarana gapura yang mempunyai nilai-nilai estetika dan ciri khas moderasi beragama seperti “*selamat datang di kampung moderasi beragama di Desa Mammi*”
5. Diperlukan monitoring dan evaluasi pihak yang berwenang dalam mengontrol terlaksananya program Kampung Moderasi Beragama di masyarakat

D. Kesimpulan

Program kampung moderasi beragama akan terus dilakukan sesuai dengan Perpres 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama melibatkan para penyelenggara negara di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat.

Untuk membumikan moderasi beragama dibutuhkan pemahaman dan kolaborasi yang seragam antara penduduk desa, pemerintah setempat dan tokoh beragama selain itu untuk menguatkan eksistensi Penyuluh Agama di tengah Masyarakat dan meningkatkan Kualitas Pembinaan moderasi beragama kelompok sasaran oleh Penyuluh Agama

Peluncuran Kampung Moderasi Beragama merupakan langkah penting dalam membangun harmoni dan pemahaman keagamaan dalam masyarakat. Desa Mammi menjadi percontohan ini menjadi bukti nyata akan kekuatan saling menghormati, dialog, dan kerja sama antara komunitas keagamaan yang berbeda

E. Daftar Pustaka

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama

Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 2022 tentang pedoman penguatan Moderasi Beragama di Lingkungan Kementerian Agama.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor 137 tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Kampung Moderasi Beragama